

**Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Waroeng Kepada Masyarakatdesa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi**

**Ruslan Nurhasan\*<sup>1</sup>, Kusrin<sup>2</sup>, Hanny Purnamasari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [Nurhasanruslan123@gmail.com](mailto:Nurhasanruslan123@gmail.com) , HP. 081387801086

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Oktober 2021

Direvisi: 17 November 2021

Dipublikasikan: Desember 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5763945

---

**Abstract:**

*This research departs from a problem of inaccuracy in the distribution of non-cash cash assistance (BPNT) in the KUBE PKH E-waroeng Program in Tanjung Baru Village. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of non-cash food assistance (BPNT) in the KUBE PKH E-waroeng Program in Tanjung Baru Village, East Cikarang District, Bekasi Regency. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation. The data was taken from a predetermined number of 6 people. This study uses the theory of Budiani's Effectiveness (in Pratiwi and Nurcahyo 2017) namely the Accuracy of Program Targets, Program Socialization, Program Objectives and Program Monitoring. The results of this study indicate that there are several factors that make the implementation of non-cash food assistance (BPNT) in the E-waroeng KUBE PKH program not yet on target in Tanjung Baru Village, namely the data renewal process that has not been maximized which resulted in the distribution of BPNT in the E-waroeng KUBE PKH program. has not been distributed to recipients who are entitled to this assistance and the lack of public knowledge in the distribution of BPNT in the KUBE PKH E-waroeng program.*

**Keywords:** *Effectiveness, E-Waroeng Kube PKH, Tanjung Baru Village*

---

**PENDAHULUAN**

Pemberantasan kemiskinan menjadi target penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan keberhasilan negara mewujudkan cita-cita

bangsa Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dipenuhi hak-hak dasar untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, sumber daya alam, rasa aman dan nyaman,

pertanahan serta diberikan hak untuk berpartisipasi dalam urusan sosial dan politik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta jiwa yang mengalami penurunan sebanyak 0,88 juta jiwa dibandingkan September 2018. Bila di persentasekan penduduk miskin pada September 2019 menurun 0,44 persendibandingkan September 2018 (Marhaeni, 2020).

Kemiskinan menurut Bappenas dalam Asep Saefudin, Dkk (2003) merupakan Suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai pada taraf yang manusiawi. Kemiskinan pada negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh adanya pengangguran, banyak faktor yang memicu kemiskinan pada negara berkembang, antara lain: kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam yang terbatas dan kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan yang rendah.

Menurut Hanif Nurcholis (2011) umumnya faktor tersebut banyak dijumpai di pedesaan, desa atau pedesaan adalah suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk dengan jumlah tertentu yang saling mengenal berdasarkan hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi masyarakat hukum yang berdasarkan kepada adat sehingga terbentuknya suatu ikatan antar sesama warganya, umumnya warga yang hidup bersumber dari pertanian dan mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif berada diwilayah pemerintahan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa:Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ataumasyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan

kegiatan pemberdayaan, pendampingan, sertafasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiapwarga negara.

Salah satu program Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non tunai merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus roda kemiskinan di Indonesia. Sasaran Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) merupakan keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil dan menyusui, serta balita berusia nol sampai dengan anak usia enam tahun. Serta komponen pendidikan dengan kriteria anak usia enam sampai dua puluh satu tahun, yang belum menyelesaikan wajib belajar selama dua belas tahun dan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari enam puluh tahun serta penyandang disabilitas.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres tersebut berisi tentan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNK2P) yang di tingkat Pemerintah Pusat keanggotaannya terdiri dari Pemerintah, Masyarakat, Dunia usaha, dan pemangku usaha lainnya. Sedangkat ditingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dibentuk Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Dalam kordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan prihal mekanisme bantuan sosial non tunai yang berkaitan dengan perluasan keuangan inklusif pada April 2016. Sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo, Kementrian sosial membuat program penanganan kemiskinan yang bersinergi agar hasilnya dapat efisien dan

efektif yang memberikan dampak lebih luas. Program yang diciptakan Kementerian Sosial yaitu, bantuan sosial non tunai yang disebut E-Waroeng KUBE-PKH. Program E-waroeng ini pertama kali diresmikan di Kota Malang yang merupakan program penanganan kemiskinan yang disinergikan, agar selanjutnya dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta berdampak luas. Program ini merupakan peralihan dari bantuan sosial tunai ke bantuan sosial non tunai yang berbasis teknologi. Tujuan program ini adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif, sehingga dapat mengikut sertakan masyarakat dalam program tersebut.

Program e-Warong KUBE-PKH merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang "Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama". Program ini adalah suatu tindak lanjut dari upaya mengurangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Program e-Waroeng KUBE-PKH yang diluncurkan oleh Kementerian sosial telah menjadi agen pembayaran keuangan perpanjangan tangan dari perbankan serta penyedia bahan pangan yang telah bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum Bulog) untuk penerima manfaat program bantuan pangan, sehingga KPM tidak lagi menjadi penonton dalam bantuan sosial, tetapi ikut berperan aktif dalam pengelolaan bantuan sosial itu sendiri. Selain itu, gagasan pembentukan e-Waroeng KUBE-PKH berawal dari pemberdayaan masyarakat yang telah terbentuk yaitu Kelompok Usaha Bersama atau sering disebut dengan KUBE. E-Waroeng KUBE-PKH merupakan warung sembako biasa namun proses transaksinya yang berbeda yakni berupa non tunai atau elektronik yang bertujuan agar bantuan yang diterima

masyarakat tepat sasaran, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan usaha, serta sebagai wadah untuk memasarkan hasil produksi masyarakat sekitar terutama untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pelaksanaan program e-Waroeng telah berjalan sekitar 4 tahun mulai dari 2016 sampai dengan saat ini program e-waroeng tidak luput dari berbagai masalah. Misalnya, masih ada ketidak sesuaian KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari jumlah masyarakat tidak mampu dan penerima KPM belum sesuai sehingga penyaluran manfaat tidak tepat sasaran. Serta permasalahan terkait sumber daya manusia (SDM) dimana pendamping serta pengurus e-Warong masih sangat membutuhkan pendampingan berupa pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang program e-warong.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kota industri, terdapat lebih dari 75 perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, dan bergerak pada bidang produksi sebagai penunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik bagi pemerintah maupun bagi warga Kabupaten Bekasi. Letak wilayah yang cukup strategis, menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai faktor utama untuk menarik perhatian para investor untuk berinvestasi dalam hal pembangunan dan perindustrian di kawasan yang prospektif ini. Perkembangan serta kemajuan dalam pembangunan dan pemberdayaan potensi wilayah Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar bukan hanya untuk mereka yang memiliki segelincir harta, tetapi harapan itu juga berhak dimiliki oleh Warga Kabupaten Bekasi. Lebih dari 3 Juta Penduduk Kabupaten Bekasi yang memiliki mimpi besar agar dapat memajukan daerahnya, memiliki mimpi besar untuk bergotong royong menjadi pemegang industri pada wilayah kabupaten Bekasi.

Di desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi

yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.672 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebanyak 1.638 jiwa. Tingkat kemiskinan di desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur dikarenakan salah satu faktornya adalah pengangguran, masyarakat lanjut usia yang sudah tidak memiliki pendapatan tetap.

Program bantuan sosial merupakan suatu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat miskin melalui program jaminan sosial yang telah ditentukan.

Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara. Pementasan kemiskinan merupakan salah satu usaha yang sampai pada saat ini masih dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo pada rapat terbatas mengenai Program Raskin pada Juli 2016, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada tiap-tiap rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi dapat disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan kepada masyarakat sebagai program penanggulangan kemiskinan yang meliputi jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pelayanan dasar. Dalam program ini pemerintah berharap bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam menjangkau layanan keuangan diperbankan, sehingga dapat mempercepat program keuangan inklusif.

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang

dimaksud disini dapat digunakan untuk menerima sembako yang berisi beras dan telur yang ada dipasar ataupun toko yang sesuai dengan harga yang berlaku, dengan begitu juga masyarakat dapat memperoleh nutrisi yang seimbang bagi kesehatan. Dengan penyaluran bantuan non tunai juga bisa membiasakan masyarakat untuk menabung, karna dalam hal ini masyarakat bisa mengatur sendiri pengambilan sembako sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang di atur dalam peraturan kementerian sosial No 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran bantuan pangan non tunai.

Program e-Warong KUBE PKH merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mensinergikan bantuan yang yang diberikan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH di Desa Tanjung Baru, masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya seperti belum tepat sasaran para penerima penerimaan program pada warga Desa Tanjung Baru sendiri. Hal ini disebabkan karna penerimaan bantuan merujuk pada data langsung dari pusat yaitu Kementerian Sosial sehingga pemerintah Desa Tanjung Baru sulit untuk mendeteksi sejauhmana perkembangan penerimaan bantuan maka program ini masih dikatakan belum berjalan secara efektif. Seiring berjalannya pelaksanaan perlu melakukan pembaharuan data penerimaan bantuan di Desa Tanjung Baru secara keseluruhan. Sehingga penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas. Berikut data mengenai jumlah penerima Program E-waroenk di Desa Tanjung Baru :

**Tabel 1.** Jumlah Penerima Penerima E-Waroenk Di Desa Tanjung Baru

| Lokasi                  | Kuota Penerima 2017-2019 | Penerima Program E-warong |     |     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|-----|
|                         |                          | 20                        | 20  | 20  |
| Dusun I Rawa Gebang     | 149 KK                   | 138                       | 126 | 138 |
| Dusun II Pesanggrahan   | 40 KK                    | 35                        | 36  | 35  |
| Dusun III Sasak Panjang | 147 KK                   | 135                       | 116 | 138 |

Sumber: Desa Tanjung Baru, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah data penerima bantuan setiap tahunnya berubah, hal itu disebabkan oleh perubahan data dari Kementerian Sosial, kuota yang tidak terpenuhi disebabkan oleh data yang masih bermasalah, seperti masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak tersalurkan karena data penerima masih membutuhkan proses validasi, sehingga bantuan belum sepenuhnya tersalurkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dalam Program e-Warong, maka penulis tertarik untuk mengetahui Efektivitas Program E-warong di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur karena peneliti melihat adanya suatu permasalahan yang tidak sesuai dengan prosedur program serta belum terlihat adanya perubahan dalam pelaksanaannya, dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana program yang dituntut untuk menjalankan program agar apa yang menjadi tujuan program bias tercapai dengan baik serta berjalan secara efektif. Kaitannya antara penelitian ini dengan ilmu pemerintahan adalah dimana ilmu pemerintahan mempelajari unsur good governance yang salah satu unsurnya adalah efektif dan efisien.

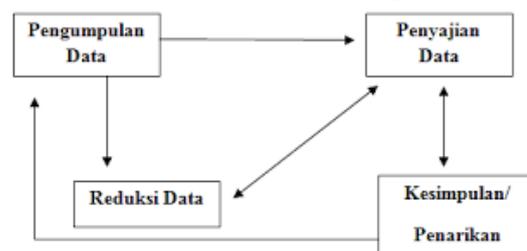
Beberapa permasalahan mengenai efektivitas program E-Warong akan berusaha dianalisis dengan menggunakan teori ukuran Efektivitas menurut Subagyo dalam (Budiani, 2007) dalam berpendapat efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat

mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut ini:

1. Ketepatan Sasaran Program  
Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program  
Sosialisasi program adalah penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana program guna memberikan penjelasan kepada sasaran program atau masyarakat agar tersampaikan dengan baik
3. Tujuan Program  
Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya
4. Pemantauan Program  
Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan model dari Miles dan Huberman yang memuat tiga tahapan, yakni Reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Model Pengolahan Data Miles dan Huberman. Sumber: Sugiyono, 2016

Peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan

lapangan yang bertujuan untuk dapat memahami mengenai Efektivitas Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) kepada Masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. agar dapat memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang lebih cepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketepatan Sasaran

Berdasarkan indikator Ketapatsasaran Program, peneliti menemukan beberapa aspek yang terkandung di dalamnya; yaitu adapun peranan dari Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur yang harus terlihat untuk menjamin kesejahteraan bagi warga Desa Tanjung Baru, dari pada pihak Desa Tanjung Baru sendiri untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

Terkait kesesuaian implementasi dengan program dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat sedikit kendala yang terjadi yang perlu diperbaiki secara teknis karena untuk penyaluran Program E-Warong KUBE PKH, sehingga pemerintah desa terkadang sulit untuk mendeteksi terkait data penerima bantuan.

Berdasarkan laporan Program E-warong KUBE PKH Desa Tanjung Baru kouta penerima E-warong KUBE PKH berdasarkan data tahun 20017 Desa Tanjung Baru sebanyak 336 KK namun berdasarkan data laporan tahun 2017 yang terealisasikan hanya berjumlah 284 KK dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.** Daftar Penerima Program E-Warong 2017

| N o | Lokasi        | Rt  | Kuota | Realisasi |
|-----|---------------|-----|-------|-----------|
| 1   | Dusun I Rawa  | 001 |       | 51KK      |
|     |               | 002 | 149K  | 30KK      |
|     | Gebang        |     | K     | 45KK      |
| 2   | Dusun II      | 001 | 40KK  | 30KK      |
|     | Pesanggrahan  |     |       | 6KK       |
| 3   | Dusun III     | 001 |       | 46KK      |
|     |               | 002 |       | 37KK      |
|     | Sasak Panjang | 003 |       | 10KK      |
|     |               | 004 |       | 9KK       |

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 005 | 147K | 6KK |
|     | K    | 8KK |

*Sumber : Laporan Rekapitulasi Program E-warong Tanjung Baru, 2017*

Berdasarkan analisis diatas, peneliti dapat disimpulkan bahwa Program E-warong KUBE PKH di Desa Tanjung Baru 2017 belum cukup efektif disebabkan masih terdapat KKS yang bermasalah yang tidak dapat digunakan karena kurangnya kesigapan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program E-warong KUBE PKH pada awal program ini dilaksanakan.

**Tabel 3.** Penerimaan Program E-Warong 2018

| N o | Lokasi    | Rt           | Kuota | Realisasi |
|-----|-----------|--------------|-------|-----------|
| 1   | Dusun I   | 001          |       | 57KK      |
|     |           | 002          | 149K  | 33KK      |
|     | Gebang    | RG           | K     | 48KK      |
| 2   | Dusun II  | 001          | 40KK  | 33KK      |
|     |           | Pesanggrahan | P     |           |
| 3   | Dusun III | 001          |       | 44KK      |
|     |           | Sasak        |       | 38KK      |
|     | Panjang   | 003          |       | 14KK      |
|     |           | 004          | 147K  | 10KK      |
|     |           | 005          | K     | 5KK       |
|     | SP        |              | 7KK   |           |

*Sumber : Laporan Rekapitulasi Program E-warong Tanjung Baru, 2018*

Pada analisis diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan Program E-Warong KUBE PKH di Desa Tanjung Baru pada tahun 2018 sudah cukup efektif. Pemerintah desa Tanjung Baru melakukan perbaikan secara bertahap dengan memverifikasi ulang terkait data penerima E-warong yang bertujuan tidak adanya ketidak tepat sasaran penerima bantuan dengan terpenuhinya syarat kepesertaan.

**Tabel 4 Data Penerima E-Warong 2019**

| N o | Lokasi  | Rt  | Kuota | Realisasi |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| 1   | Dusun I | 001 |       | 53KK      |
|     |         | 002 | 149K  | 37KK      |
|     | Gebang  | RG  | K     | 48KK      |

|   |                               |                                       |           |   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| 2 | Dusun II<br>Pesanggrahan      | 001<br>P                              | 40KK      | 30KK<br>5KK                               |
| 3 | Dusun III<br>Sasak<br>Panjang | 001<br>002<br>003<br>004<br>005<br>SP | 147K<br>K | 47KK<br>35KK<br>19KK<br>9KK<br>5KK<br>5KK |

*Sumber : Laporan Rekapitulasi Program E-waroeng Tanjung Baru, 2019*

Berdasarkan analisis diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program E-waroeng tahun 2019 sudah cukup efektif dengan dilakukannya proses pembaharuan data penerima Program E-waroeng sehingga pemerintah desa bisa mengusulkan warganya yang memang dikatakan layak dalam penerimaan bantuan untuk diusulkan kepada Kementerian Sosial dengan syarat yang sudah terpenuhi.

### **Sosialisasi Program**

Kepala Desa Tanjung Baru berkewajiban untuk mensosialisasikan program yang ada pada masyarakat, agar program yang dibuat pemerintah dapat diselenggarakan dengan baik, salah satu program pemerintah adalah program bantuan sosial. Sosialisasi sangat penting untuk dilakukan karena suatu proses yang dilakukan pemerintah melalui sebuah penyebaran informasi, komunikasi, edukasi baik secara lisan tulisan maupun peragaan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar terciptanya pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh desa Tanjung Baru agar terciptanya suatu program yang efektif untuk masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Program E-waroeng KUBE-PKH pemerintah Desa Tanjung Baru memberikan sosialisasi menyapaikan kepada masyarakat dengan melibatkan aparatur pemerintah desa, RT/RW dan Kadus dengan memberikan informasi terkait pelaksanaan program,

kriteria seperti apa, keterbatasan program tersebut berkaitan dengan anggaran yang dimiliki, mungkin pemerintah pusat juga barangkali akan bertahap kedepannya.

Dinas sosial Kabupaten Bekasi tidak langsung turut serta dalam sosialisasi program melainkan memberikan informasi secara berjenjang, yaitu dinas sosial memberikan informasi pada perangkat kecamatan, untuk diteruskan informasinya kepada masyarakat.

Masyarakat Desa Tanjung Baru sudah diberikan sosialisasi terkait program E-waroeng KUBE PKH namun sosialisasi yang diberikan hanya satu kali saja selanjutnya langsung menerima yang mengakibatkan dari beberapa warga kurang memahami tentang mekanisme pelaksanaan program E-waroeng KUBE PKH sehingga pemahaman peserta terkait program E-waroeng KUBE PKH dirasa kurang selain itu disebabkan oleh beberapa warga yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi program dengan berbagai alasan dan juga kurang cepat tanggapnya respon petugas dalam menanggapi permasalahan program.

Kemudian, kesimpulan dari indikator Sosialisasi Program, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-waroeng KUBE PKH kepada masyarakat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, proses sosialisasi belum optimal. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa Tanjung Baru hanya melaksanakan proses sosialisasi hanya satu kali selama program ini berjalan seharusnya pemerintah Desa Tanjung Baru berkewajiban untuk mensosialisasikan program, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar program yang dibuat pemerintah dapat diselenggarakan dengan baik, salah satu program pemerintah adalah program bantuan sosial.

### **Tujuan Program**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bantuan sosial merupakan bagian terpenting dari pembangunan

nasional sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai Pancasila. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.

Target yang ingin dicapai mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial. Dapat diartikan hidup bebas dari kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan.

Tujuan dari program E-warong KUBE PKH ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan nutrisi seimbang kepada masyarakat walaupun manfaat ini belum dirasakan seluruh calon KPM yang berhak karena dalam program ini masih dilakukan perbaikan secara bertahap agar berjalan secara efektif. Tujuan dari Program E-warong KUBE PKH ini sangat diharapkan sekali oleh masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kemudian, kesimpulan dari indikator tujuan program, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Program E-warong KUBE PKH, sudah dikatakan efektif dikarenakan penerima bantuan sudah merasakan manfaatnya. Selain itu juga penerima bantuan dapat membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan pangan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi lebih seimbang dengan diiringi perbaikan kualitas pangan yang semakin baik di Desa Tanjung Baru.

Berdasarkan analisis tidak semua warga dilibatkan dalam proses pemantuan program E-warong KUBE PKH. Masyarakat dapat berperan aktif dalam

penyelenggaraan sosial, seperti menggerakkan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi, dan membantu masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan. Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 2019 Pasal 57 tentang pekerja sosial meliputi paling sedikit:

1. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan masalah sosial;
2. Menyampaikan laporan adanya masalah sosial yang perlu penanganan pekerja sosial;
3. Menyampaikan laporan terjadinya malpraktik yang dilakukan pekerja sosial;
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial;

Kemudian, kesimpulan dari analisis indikator pemantauan program, peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Warong kepada Masyarakat di Desa Tanjung Baru Kecamatan.

Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Tahun, sudah dikatakan cukup efektif, pemantauan program dapat dikembangkan untuk identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dengan cara melakukan penggalian data atau informasi secara mendetail terkait permasalahan dilapangan, identifikasi potensi dan sumber daya untuk memahami kebutuhan masyarakat, kemudian akan terjadi pemetaan sosial upaya untuk membantu menemukan dan mengenali masalah, potensi, dan sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan fungsi peran dari Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program E-warong KUBE PKH

## **KESIMPULAN**

Ketepatan Sasaran Program dalam Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-warong di desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Penerima bantuan

Program E-waroeng KUBE PKH di Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi sudah hampir mencapai 40% dari kouta yang ditetapkan oleh Kementerian sosial, seiring dengan dilakukannya penambahan-penambahan yang diusulkan oleh Desa Tanjung Baru dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial melakukan survei dengan melibatkan PSM. Adanya pembaharuan data yang dilakukan pemerintah Desa Tanjung Baru setiap dua bulan sekali oleh desa Kepala Desa Tanjung Baru beserta tokoh masyarakat yang terlibat dalam program e-waroeng KUBE PKH melakukan pendampingan sosial dengan menjalin relasi kepada masyarakat untuk membantu mengungkapkan kebutuhan masyarakat, memahami masalah-masalah masyarakat, mencari strategi untuk solusi pemecah masalah, kemudian memilih dan menerapkan strategi yang sudah ditetapkan, mengembangkan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah secara lebih efektif.

Sosialisasi Program dalam Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-waroeng kepada Masyarakat Desa Tanjung baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dalam indikator ini proses sosialisasi belum optimal. Hal ini disebabkan karena pemerintah Desa Tanjung Baru hanya melaksanakan proses sosialisasi hanya satu kali selama program ini berjalan seharusnya pemerintah Desa Tanjung Baru berkewajiban untuk mensosialisasikan program, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar program yang dibuat pemerintah dapat diselenggarakan dengan baik.

Tujuan Program dalam Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-waroeng Kepada Masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dalam indikator ini sudah dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan penerima bantuan sudah merasakan manfaat sehingga tujuan

dari program E-waroeng ini sudah mulai tercapai seperti kelancaran penyaluran dana bantuan dan kualitas bahan pangan yang sudah baik.

Pemantauan Program dalam Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-waroeng kepada masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dalam indikator ini sudah dikatakan cukup efektif. Bahwasanya pemantauan program dapat dikembangkan untuk identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dengan cara melakukan penggalian data atau informasi secara mendetail terkait permasalahan dilapangan, identifikasi potensi dan sumber daya untuk memahami kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program E-waroeng pada Desa Tanjung Baru dapat dikatakan efektif apabila dianalisa berdasarkan teori dari Budiani dalam (2007) yaitu Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Desa Tanjung Baru telah dinilai efektif dan optimal pada tiga indikator yaitu Ketepatan Sasaran Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program. Kemudian pada indikator lainnya yaitu Sosialisasi Program perlu ditingkatkan agar tujuan dari program dapat berjalan lebih efektif secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2 No. 1, 49-57.

- Georgopolous, & Tannebaun. (1985). *Evektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handayaniingrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Handoko. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hidayat. (1986). *Teori Evektifitas dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Marhaeni, H. (2020, Januari 15). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Saefudin, A. (2003). *Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, A. (2012). *Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Produk Regulasi Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama